



Analisis Penerapan Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa Sekolah

Feni Huspita Sari^{1*}, Ade Uswatun Hasanah¹, Sutinah Andaryani¹

¹ STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: fenihuspita2@gmail.com

Article History:

Received: May 28, 2026

Revised: June 10, 2026

Accepted: June 29, 2026

Keywords:

Good Governance;

Public Policy;

Free Nutritious Food;

School Student

Abstract: The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the Indonesian government's strategic initiatives aimed at improving the nutritional status, health, and learning outcomes of school students. The successful implementation of this program depends not only on the availability of funding and effective food distribution but also on the application of good governance principles, including transparency, accountability, participation, effectiveness, and coordination among stakeholders. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the Free Nutritious Meal Program and identify the challenges that affect its effectiveness. The study employs a qualitative approach using a literature review method by examining relevant academic publications, government policy documents, and previous research related to public governance and nutrition programs. The findings indicate that the implementation of good governance principles in the MBG program continues to face several challenges. The main issues include limited transparency in information disclosure, inadequate accountability mechanisms, insufficient public and stakeholder participation, and suboptimal program effectiveness. Furthermore, weak inter-agency coordination and inadequate monitoring and evaluation systems hinder the achievement of the program's objectives. Therefore, continuous improvements in governance are essential through strengthened institutional coordination, enhanced transparency and accountability, and more effective monitoring mechanisms and public participation. These measures are expected to improve the efficiency, effectiveness, and sustainability of the Free Nutritious Meal Program, thereby ensuring that its intended social and public health objectives are successfully achieved.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Sari, F. H., Hasanah, A. U., & Andaryani, S. (2026). Analisis Penerapan Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa Sekolah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(6), 3224–3238. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i6.6865>

PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi yang optimal pada anak usia sekolah dasar merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Masa usia sekolah merupakan periode krusial dalam siklus kehidupan manusia, karena pada fase ini terjadi perkembangan kognitif, fisik, dan sosial yang signifikan. Kekurangan asupan gizi pada tahap ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan belajar, produktivitas, serta kualitas hidup di masa depan (WHO, 2021).

Di Indonesia, permasalahan gizi anak masih menjadi isu strategis yang belum sepenuhnya teratasi. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada anak Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan

dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, permasalahan lain seperti wasting dan underweight juga masih ditemukan pada kelompok usia anak sekolah dasar. Kondisi ini diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap pangan bergizi masih terjadi, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi permasalahan gizi dan relevansi program makan bergizi, berikut disajikan data terkait status gizi anak di Indonesia menurut FAO (Food and Agriculture Organization) dari tahun 2019-2021 dalam lingkup Asia Tenggara.

Gambar 1. Tingkat Stunting di Asia Tenggara



Sumber: Food and Agriculture Organization (FAO) 2019-2021

Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan gizi anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius dibandingkan negara Asia Tenggara lain yang membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi strategis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dalam pelaksanaannya.

Secara global, World Health Organization menegaskan bahwa malnutrisi pada anak usia sekolah berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan belajar dan meningkatnya risiko penyakit jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi berbasis sekolah seperti program pemberian makanan bergizi menjadi salah satu strategi yang direkomendasikan secara internasional untuk meningkatkan status gizi anak sekaligus mendukung capaian pendidikan.

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi anak sekolah. Program ini dirancang untuk memberikan akses makanan sehat dan bergizi secara merata kepada siswa sekolah dasar, khususnya dari keluarga kurang mampu. Selain berfungsi sebagai intervensi gizi, program ini juga merupakan bagian dari kebijakan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di lapangan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Beberapa studi menunjukkan adanya kendala dalam hal distribusi makanan, kualitas gizi yang tidak konsisten, keterbatasan anggaran, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia layanan, juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada tata kelola pelaksanaan program.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip good governance. Konsep good governance

menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (United Nations Development Programme, 2018). Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, transparansi diperlukan untuk memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran dan distribusi makanan. Akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, juga diperlukan agar program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sementara itu, efektivitas dan responsivitas berkaitan dengan kemampuan program dalam memberikan manfaat nyata serta menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak masalah yang ada dilapangan seperti masalah distribusi yang kurang merata, keracunan hingga masalah lain yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan Program ini. Hal ini diungkapkan oleh Nango (2025) bahwa Implementasi kebijakan MBG di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala atau tantangan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan program ini. Kendala-kendala itu antara lain keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga kerja terlatih, lemahnya pengawasan, transparansi anggaran, dan lain-lain.

Di tingkat sekolah dasar, implementasi program ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, hingga penyedia makanan. Kompleksitas aktor ini menuntut adanya koordinasi yang baik serta penerapan prinsip *good governance* secara konsisten. Tanpa tata kelola yang baik, program berpotensi mengalami berbagai permasalahan seperti penyimpangan anggaran, ketidaktepatan sasaran, serta rendahnya kualitas layanan.

Gambar 2. Data Kasus Keracunan MBG di Indonesia



Sumber : bbc News Indonesia 2026

Salah satu permasalahan yang muncul yaitu masalah keracunan MBG yang semakin bertambah dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan program. Pada gambar diatas menunjukkan bahwa bulan September 2025 adalah kasus keracunan terbanyak sebanyak 1.726 kasus.

Menurut BBC News Indonesia, Sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG telah ditemukan di 16 provinsi sejak 17 Januari-18 September 2025, menurut catatan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). Akhir Juni lalu, kasus keracunan MBG tercatat 1.376 anak. Hanya dalam tiga bulan, siswa sekolah hingga guru yang mengalami keracunan menggelembung empat kali lipat. Bahkan pekan kemarin, peristiwa keracunan terjadi di dua lokasi berbeda.

Gambar 3. Kasus Keracunan MBG di 16 Provinsi



Provinsi	Jumlah kasus
Jawa Barat	2.051
DIY	905
Jawa Tengah	468
Bengkulu	456
Lampung	307
Nusa Tenggara Timur	305
Sulawesi Tengah	277
Sumatra Selatan	271
Jawa Timur	245
Nusa Tenggara Barat	150
Kalimantan Utara	59
Sulawesi Tenggara	46
Riau	32
Banten	28
Papua Barat	13
Sulawesi Utara	13
TOTAL	5.626

Sumber: bbc News Indonesia 2026

Gambar 3 menunjukkan kasus keracunan MBG pada 16 Provinsi di Indonesia dengan Jawa Barat sebagai Provinsi yang paling banyak yaitu 2051 kasus sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan baru tercatat sebanyak 13 kasus.

Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara konsep ideal Program Makan Bergizi Gratis dengan realitas implementasinya di lapangan. Banyak penelitian masih berfokus pada aspek gizi atau dampak program, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut, khususnya pada tingkat sekolah dasar. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap aturan hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam program publik diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan, meminimalkan penyalahgunaan sumber daya, dan memastikan manfaat program dirasakan oleh kelompok sasaran. Dalam konteks MBG, penerapan good governance mencakup keterbukaan dalam perencanaan menu dan anggaran, mekanisme pengawasan distribusi makanan, keterlibatan masyarakat dan orang tua, serta sistem pelaporan hasil dan penggunaan dana.

Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan tantangan implementasi MBG di lapangan, seperti keterlambatan pengiriman bahan, kualitas dan variasi makanan yang

kurang memadai, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, serta potensi korupsi atau alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Di tingkat sekolah dasar, kondisi infrastruktur dapur, kapabilitas petugas penyaji, serta peran komite sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penentu keberlanjutan dan mutu pelaksanaan MBG. Kurangnya studi yang mengaitkan faktor-faktor ini dengan indikator good governance di tingkat operasional sekolah menimbulkan kebutuhan penelitian yang lebih sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam pelaksanaan Program MBG pada sekolah dasar, mengidentifikasi kendala dan praktik baik pelaksanaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program. Fokus analisis meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, transparansi dan partisipasi stakeholder (sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan penyedia), mekanisme pengadaan dan distribusi pangan, serta sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Signifikansi penelitian ini bersifat praktis dan teoretis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberi masukan bagi pengelola program di tingkat sekolah dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola MBG sehingga manfaat program dapat dioptimalkan. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dan kebijakan sosial dengan mengintegrasikan kajian good governance ke dalam evaluasi program nutrisi sekolah dasar, terutama di konteks pelaksanaan lapangan yang kompleks.

Batasan penelitian meliputi fokus pada sekolah dasar sebagai unit analisis utama dan penekanan pada aspek tata kelola program (bukan evaluasi nutrisi individu secara klinis). Metode yang digunakan akan menggunakan literatur review untuk mengeksplorasi praktik pelaksanaan, persepsi pemangku kepentingan, serta bukti dokumen perencanaan dan pelaporan program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan *good governance* dalam MBG dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Jadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan good governance dalam program Makan bergizi gratis pada siswa sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain ***studi kepustakaan (library research)*** melalui metode ***literature review***. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep, prinsip, dan implementasi **good governance** dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis maupun pengukuran statistik, melainkan berfokus pada interpretasi, pemaknaan, serta sintesis informasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program MBG.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (**library research**) dengan metode **literature review**. Penelitian ini dilakukan melalui proses identifikasi, pengumpulan, seleksi, evaluasi, serta analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah terindeks nasional maupun internasional, buku akademik, prosiding, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga negara, publikasi organisasi internasional, serta sumber resmi lainnya yang memiliki kredibilitas tinggi. Literatur yang dipilih difokuskan pada

pembahasan mengenai prinsip-prinsip *good governance*, tata kelola sektor publik, kebijakan ketahanan pangan, program gizi masyarakat, serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, Garuda, Crossref, serta portal resmi kementerian dan lembaga pemerintah. Kata kunci yang digunakan meliputi *good governance*, *public governance*, *Makan Bergizi Gratis*, *program gizi nasional*, *akuntabilitas publik*, *transparansi*, *partisipasi masyarakat*, dan *efektivitas kebijakan publik*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi substansi, kualitas publikasi, tahun penerbitan, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian, sehingga hanya sumber-sumber yang memenuhi standar akademik yang dijadikan bahan analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)** yang dipadukan dengan pendekatan **analisis tematik (thematic analysis)**. Setiap literatur dibaca secara mendalam, kemudian dilakukan proses pengkodean (*coding*), pengelompokan tema, identifikasi pola, serta sintesis antarhasil penelitian untuk menemukan keterkaitan antara prinsip-prinsip *good governance* dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Analisis difokuskan pada lima prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (*rule of law*), yang selanjutnya digunakan sebagai kerangka konseptual dalam mengevaluasi tata kelola program.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, dilakukan proses sintesis kritis terhadap berbagai temuan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai peluang, tantangan, serta strategi penguatan penerapan *good governance* dalam Program Makan Bergizi Gratis. Hasil sintesis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi rekomendasi konseptual bagi para pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya istilah Good Governace (tata pemerintahan yang baik) dikarenakan oleh ketidakpuasan akan adanya pelayanan atau kinerja dari pemerintah yang sering dianggap kurang profesional. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Miranti (2024) “Konsep Good Governance ini munculnya karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralis, non partisipatif serta tidak akomodatif”. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya prinsip *Good Governance* diharapkan tata pemerintahan yang mulanya belum profesional dan masih bersifat sentralis, tidak partisipatif dan tidak akomodatif akan mulai melaksanakan kinerjanya dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat.

World Bank dalam Sudiarti (2019) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan

disiplin anggaran serta menciptakan legal and framework bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Prinsip *Good Governance* dalam UNDP (1997) ada 9 antara lain:

1. Participation
2. Rule of Law
3. Transparency
4. Responsiveness
5. Consensus Orientation
6. Equity
7. Effectiveness and Efficiency
8. Accountability
9. Strategic Vision

Dari 9 (sembilan) Prinsip *Good Governance* tersebut, dapat diambil 4 (empat) prinsip untuk dikaitkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa sekolah Dasar diantaranya yaitu:

1. Transparansi, agar anggaran jelas
2. Akuntabilitas, agar tidak terjadi penyimpangan
3. Partisipasi, melibatkan sekolah & masyarakat
4. Efektivitas, benar-benar meningkatkan gizi

Transparansi

Prinsip transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan program kepada publik. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi mencakup keterbukaan mengenai anggaran, pengadaan, dan distribusi makanan.

Dalam berbagai studi, transparansi menjadi faktor penting dalam keberhasilan program publik. Misalnya, penelitian oleh World Bank menekankan bahwa keterbukaan informasi publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Menurut Tirtawibowo (2026), dalam praktik implementasi program MBG masih terdapat tantangan dalam aspek kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat pelaksana. Beberapa laporan menunjukkan bahwa banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga kerja yang terlatih secara khusus dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran publik digital sesuai dengan mekanisme keuangan pemerintah (Kompas, 2024).

Lebih lanjut, menurut Suwastoyo, 2024 dalam Tirtawibowo sejumlah kajian juga menunjukkan adanya kekhawatiran publik terhadap kualitas perencanaan program, keterbatasan ruang fiskal, serta belum optimalnya kejelasan tata kelola kebijakan MBG.

Dalam Infopublik (2025) KPK mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan, mulai dari penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai rawan konflik kepentingan, proses pengajuan mitra yang berindikasi kecurangan, hingga lemahnya laporan keuangan periodik. Beberapa indikator risiko (red flag) yang dicatat KPK antara lain: Pemilihan mitra yayasan dilakukan oleh pihak yayasan sendiri, Harga pangan kerap dipengaruhi keputusan Kepala SPPG, Ada mitra yang tidak berpengalaman namun tetap dilibatkan karena kedekatan dengan pengambil kebijakan, dan Data penerima manfaat kurang valid akibat lemahnya standar operasional. Dengan adanya potensi kecurangan perlu kiranya dibuat portal khusus untuk menunjukkan seberapa besar dana yang telah dipakai untuk pengalokasian MBG dan kemana saja aliran dana secara transparan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam prinsip transparansi MBG masih belum dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan prinsip Good Governance.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksana program kepada publik, baik dalam penggunaan anggaran maupun hasil program. Menurut Mark Bovens (2007), akuntabilitas publik merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jimly Asshiddiqie dalam Khairiyah (2025) menekankan bahwa akuntabilitas negara dalam pelayanan publik merupakan instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dijalankan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Untuk itu, perlu adanya pertanggungjawaban dalam hal keuangan dalam pengeluaran MBG yang telah berjalan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulaika (2025) menjelaskan bahwa Akuntabilitas anggaran merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara fundamental menuntut bahwa pengelolaan keuangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan lembaga pengawas. Hal ini bahwa dibalik akuntabilitas pelaksana program MBG, fungsi pengawasan harus dilaksanakan juga dalam pertanggungjawaban keuangan.

Lebih lanjut Zulaika mengungkapkan bahwa pada wacana publik, muncul kekhawatiran bahwa Program MBG bisa menjadi “ladang korupsi baru” jika pelaksanaannya tidak didesain dengan model pengawasan yang kuat, transparan, dan responsif. Beberapa ahli menyoroti minimnya perhatian terhadap aspek desain sistem informasi akuntabilitas yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, serta belum jelasnya skema audit dan pelaporan berkala yang bisa diakses publik. Data berikut menunjukkan besarnya anggaran belanja dari BGN tahun 2025 yang bahkan lebih besar anggaran pengadaan kendaraan dari pada anggaran makanan MBG itu sendiri.

Gambar 4. Data belanja BGN 2025



Sumber: BeritainKalbar.com

Gambar diatas menunjukkan besaran biaya yang dikeluarkan BGN dalam 1 (satu) tahun terakhir yang menunjukkan biaya makanan yang paling kecil yaitu 242,8 M dibandingkan belanja Kendaraan BGN sendiri yaitu 1,39 T, lalu di susul untuk gaji SPPG dan operasionalnya sebanyak 1,26 T.

Disamping akuntabilitas keuangan, ada hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam akuntabilitas MBG yaitu pencapaian target program atau tujuan dibuatnya program tersebut. Zulaika (2025) mengungkapkan bahwa banyak program sosial di Indonesia

masih terjebak pada akuntabilitas administratif yang bersifat dokumen formal, bukan pada substansi pencapaian. temuan (KPK, n.d.) pada program makanan tambahan menunjukkan bahwa laporan keuangan dibuat tepat waktu dan lengkap secara administratif, tetapi kualitas makanan dan dampaknya terhadap gizi anak tidak terpantau secara sistematis. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem pengawasan MBG harus berorientasi pada hasil (*result-based accountability*), bukan sekadar pada laporan administratif.

Tabel 1. Rekapitulasi KPAI- Korban MBG 2025

No.	Provinsi	Jumlah Korban	% dari Total
1	Jawa Barat	4877	38.5%
2	Jawa Tengah	1961	15.5%
3	DI Yogyakarta	1517	12%
4	Provinsi Lainnya (35 prov.)	4303	34%

Sumber: KPAI 2025

Tabel dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) diatas menunjukkan bahwa keracunan yang terjadi diempat provinsi terbanyak. Jawa Barat sebanyak 4877 korban terbanyak dan Provinsi lainnya yaitu 4303 korban anak sekolah.

Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc. menilai kasus ini sangat serius karena melibatkan ratusan siswa yang keracunan dalam dua kejadian pada bulan Agustus 2025. Menurutnya kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan. Padahal tujuan awal MBG adalah untuk meningkatkan gizi, mengurangi stunting dan malnutrisi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan dalam Akuntabilitas yang ada.

Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Menurut Sherry R. Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation*, tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program publik.

Amartya Sen (dalam Keladu:2025) mengungkapkan bahwa dalam mengambil sebuah kebijakan publik, sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan menekankan konsep *public reasoning*, di mana masyarakat seharusnya terlibat dalam merancang program yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus ada dalam proses kebijakan (baik itu dalam perencanaan atau perumusan kebijakan maupun pengawasan kebijakan MBG. Keladu melanjutkan bahwa jika membaca dinamika yang terjadi dalam konteks kebijakan MBG, hal ini rupanya tidak mendapatkan tempat nyatanya hal ini tidak sepenuhnya terjadi. Hal itu disebabkan karena MBG dirancang semata-mata sebagai sebuah proyek '*top-down*' dan bukannya sebuah program '*bottom-up*'

Berbeda dengan Keladu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan, ribuan dapur mitra

menjadi tulang punggung pelaksanaan program. Masyarakat menjadi bagian dari MBG, seluruh dapur yang terlibat merupakan hasil kerja sama BGN dengan masyarakat setempat. Hingga kini belum ada dapur yang dibangun langsung oleh pemerintah pusat. (RRI:2025).

Partisipasi masyarakat juga dapat berupa pengawasan dan pemantauan program MBG yang ada saat ini dengan membuat platform masyarakat dan independen koalisi masyarakat sipil untuk mengawasi, melaporkan dan memantau program agar transparan, tepat sasaran dan akuntabel. Salah satu platform tersebut adalah MBG watch dengan membuka partisipasi publik melalui mbgwatch.org, lalu whatsapp dan formulir pengaduan diplatformnya (Transparency Internasional Indonesia:2025)

Rizky Dwi Lestari, seorang Peneliti Unitrend, menjelaskan bahwa “Upaya pengawasan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat” dan tentu saja keamanan pelapor akan menjadi prioritas karena bersifat anonim.

Times Indonesia (2025) menjelaskan Dzatmiati Sari dari Transparency International Indonesia mengungkap potensi konflik kepentingan dalam proyek Sentra Produksi Bahan Gizi (SPBG), termasuk dugaan keterlibatan pihak berafiliasi dengan militer dan pengusaha besar. LBH Jakarta melalui Fadhil Alfathandari menambahkan bahwa MBG Watch akan menjadi mitra kritis pemerintah untuk memastikan tata kelola program berlangsung transparan dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Dari berbagai versi pendapat tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah yang dianggap sangat penting bawa partisipasi masyarakat dalam Program MBG sangat diperlukan, dalam sebuah artikel mengungkapkan bahwa belum terlihat partisipasi masyarakat sedangkan Deputy Sistem dan tata Kelola BGN mengungkapkan bahwa dapur MBG adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat, dan untuk pengawasan melalui pemantauan masyarakat sudah ada platform yang dibuat secara independen dengan bekerjasama beberapa pihak yang dapat ikut mengawasi jalannya MBG bagi anak sekolah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Efektifitas

Efektivitas menunjukkan keberhasilan program dalam mencapai tujuan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya. Laporan World Health Organization (2021) menunjukkan bahwa program intervensi gizi di sekolah dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar siswa jika dikelola secara efektif.

Menurut Kemendikdasmen (2025) Tujuan utama dari Program MBG adalah untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan. Kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Selain itu, Program MBG juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pakar Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Dr. Toto Sudargo, SKM, M.Kes., mengatakan program MBG ini layak

didukung dan memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah stunting jika dilaksanakan dengan tepat sasaran dan profesional. (Liputan UGM:2025)

Agar program ini efektif pentingnya melibatkan ahli gizi dalam setiap lini perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, mendorong pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa agar pengawasan dan pelaksanaan lebih optimal. Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi karena tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen.

Untuk melihat efektifitas dari indikato capain tujuan Program MBG ini berjalan masih belum Maksimal dalam pelaksanaannya. Dibeberapa wilayah banyak keluhan dari makanan

MBG ini yang memang belum terpenuhi gizinya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) Hari pertama program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu ditemukannya belatung pada sayuran serta buah yang sudah membusuk. Belatung dan buah yang membusuk itu ditemukan dalam makanan yang dibagikan untuk siswa SMP Negeri 1 Komodo Labuan Bajo. Padahal sebelum makanan didistribusikan ke siswa, petugas Loka POM Manggarai Barat telah melakukan pemeriksaan sampel dan merekomendasikan makanan tersebut layak dikonsumsi. Grace, seorang Siswi SMPN 1 Komodo mengakui ada belatung pada makanan yang disediakan. Selain belatung buah yang berikan sudah bau dan busuk. (Wacana edukasi:2025)

Berikut adalah salah satu artikel yang membahas bahwa dampak yang dihasilkan MBG pada anak sekolah dasar di Indonesia tahun 2025 menunjukkan hasil yang efektif, menurut Hanifah (2025) Selain mengurangi stunting dan obesitas, pemberian makanan bergizi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan umum anak. Makanan yang bergizi mendukung fungsi sistem imun, yang memungkinkan tubuh anak untuk lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit

Tabel 2. Dampak MBG terhadap Status Gizi Siswa SD

No	Aspek Dampak	Uraian
1	Penurunan Stunting	Potensi penurunan 10–15% dalam 3–5 tahun
2	Pengurangan Obesitas	Pola makan lebih sehat dan terkontrol
3	Peningkatan Kesehatan Umum	Asupan gizi mendukung sistem imun, menurunkan absensi
4	Konsentrasi dan Daya Ingat	Nutrisi mendukung fungsi otak dan daya ingat
5	Kehadiran di Sekolah	Anak lebih sehat dan termotivasi hadir
6	Keterampilan Sosial dan Psikologis	Mengurangi rasa malu, membentuk interaksi sosial

Sumber: IPPSJ (2025)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Herniati (2025) menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RA Al-Mansyuriah Selong Paok merupakan program pemerintah yang menyediakan makanan sehat kepada siswa secara gratis. Program ini meningkatkan kehadiran siswa, meningkatkan minat belajar siswa dan membantu

mereka makan dengan baik, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Meskipun demikian, dampak terhadap hasil belajar masih memerlukan evaluasi dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah, preferensi rasa anak yang beragam, dan kurangnya edukasi gizi adalah beberapa tantangan dalam implementasi. Dukungan dari guru dan orang tua membantu program berjalan dengan lancar. Untuk memastikan program ini berhasil di masa mendatang, evaluasi dan peningkatan sistem diperlukan.

Menurut Risnawati Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Sungai Miai 5 berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan kondusif. Program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik siswa, tetapi juga mendukung kesiapan belajar dan peningkatan efektifitas pembelajaran. Sejalan dengan penelitian oleh (Merlinda & Yusuf, 2025) menunjukkan bahwa status gizi berpengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar siswa. Siswa dengan status gizi baik cenderung memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga mampu menyerap pelajaran dengan lebih efektif. Sebaliknya, siswa dengan status gizi kurang akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada prestasi akademik mereka.

Dari beberapa data yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan MBG sudah cukup efektif hanya perlu diperbaiki lagi pada pelaksanaan operasional.

KESIMPULAN

Prinsip *Good Governance* dalam penerapan 4 prinsip menurut UNDP (1997) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Efektivitas. Untuk Transparansi masih belum dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Dimana penanggaran dan pelaporan masih belum transparan kepada publik, kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat pelaksana. Beberapa laporan menunjukkan bahwa banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga kerja yang terlatih secara khusus dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran publik digital. Lalu pada prinsip akuntabilitas, Beberapa ahli menyoroti minimnya perhatian terhadap aspek desain sistem informasi akuntabilitas yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, serta belum jelasnya skema audit dan pelaporan berkala yang bisa diakses publik pada Program MBG pada siswa sekolah. Prinsip Partisipasi sudah cukup menunjukkan peningkatan dari yang hanya masyarakat hanya sebagai penonton atau kebijakan top-down, sudah mulai muncul berbagai partisipasi masyarakat sebagai pemantauan MBG. Melalui pemantauan masyarakat sudah ada platform yang dibuat secara independen dengan bekerjasama beberapa pihak yang dapat ikut mengawasi berjalannya MBG bagi anak sekolah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Terakhir prinsip Efektivitas yaitu bagaimana program ini mencapai tujuannya pada siswa sekolah. Siswa dengan status gizi baik cenderung memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga mampu menyerap pelajaran dengan lebih efektif.

PRACTICAL & THEORETICAL IMPLICATION

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa sekolah dasar tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan distribusi makanan, tetapi juga pada kualitas tata kelola program yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis bagi pemerintah, sekolah, serta masyarakat.

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem transparansi dalam pengelolaan Program MBG. Transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan sistem informasi digital yang terbuka terkait penggunaan anggaran, proses pengadaan bahan pangan, serta distribusi makanan kepada sekolah-sekolah. Keterbukaan informasi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

Kedua, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk audit berkala terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, dan penggunaan dana. Akuntabilitas tidak hanya berfokus pada laporan administratif, tetapi juga pada pencapaian tujuan program seperti peningkatan status gizi siswa dan penurunan kasus malnutrisi.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program MBG. Oleh karena itu, sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi program. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program sehingga pelaksanaan MBG menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Keempat, dari aspek efektivitas, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pelaksanaan Program MBG memerlukan keterlibatan tenaga ahli gizi dan sistem distribusi makanan yang profesional agar kualitas makanan tetap terjaga. Pemerintah juga perlu memperhatikan standar keamanan pangan untuk mencegah kasus keracunan makanan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa perbaikan tata kelola secara berkelanjutan sangat diperlukan agar Program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas gizi siswa sekolah dasar.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam penerapan teori good governance pada kebijakan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pertama, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan salah satu prinsip tersebut dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Kedua, penelitian ini memperluas kajian good governance dengan mengaitkannya pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat sekolah dasar. Selama ini, kajian good governance lebih banyak diterapkan pada pelayanan publik secara umum, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tersebut juga relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan intervensi gizi dan kesejahteraan siswa.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pendekatan administrasi publik yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor pendukung lainnya dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Keempat, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model evaluasi kebijakan MBG berbasis good governance yang lebih komprehensif, termasuk mengintegrasikan aspek pengawasan digital, partisipasi masyarakat berbasis teknologi, dan evaluasi dampak program terhadap kualitas pendidikan serta kesehatan siswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan pelaksanaan Program MBG, tetapi juga memperkaya pengembangan teori administrasi publik dan good governance dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

1. BBC (British Broadcasting Corporation) News Indonesia. (2026). Kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. BBC News Indonesia.
2. Food and Agriculture Organization. (2019–2021). Data tingkat stunting di Asia Tenggara. FAO.
3. Herniati, N., & Idawati. (2025). Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap minat belajar anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Aura*, 6(01), 88–98.
4. Infopublik. (2025, September 1). Potensi kerawanan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Portal Berita Infopublik.
5. Keladu, Y., Dominikus, Z. D., Riendi., Felix, S., & Angelus, P. A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam perspektif Amartya Sen. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 18(01), 8–18.
6. Kemendikdasmen.go.id. (2025). Program Makan Bergizi Gratis. BPMP Sumatera Utara.
7. Khairiah, U., Jarnawi, H. S., Warsiman., & Anjani, S. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kajian prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 196–206.
8. Kompas. (2024). Menghentikan korupsi dana BOS. Kompas.
9. Liputan Universitas Gadjah Mada. (2025). Program Makan Bergizi Gratis dan penanganan stunting.
10. Miranti, D. (2024). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kaitannya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Ilmu*, 2(020), 332–342.
11. Nango, M., Budi, P., Muffarihul, H., & Karwanto. (2025). Makan Bergizi Gratis: Strategi kebijakan publik menuju Generasi Emas Indonesia 2045. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 25(2), 354–368.
12. Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866.
13. Risnawati, E., Suriansyah, A., & Harsono, A. M. B. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam peningkatan efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar. 2(4), 832–842.
14. RRI.co.id. (2025). Partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis.
15. Sudiarti. (2019). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan. *Jurnal Manajemen Keuangan dan Komputer*, 3(1), 46–56.
16. Suwastoyo, B. (2024). Dilema program makan siang gratis antara manfaat dan tantangan. Center for Indonesian Policy Studies.

17. Tirtawibowo, B., Rianestu, F. A. S., & Lumban Gaol, I. D. (2025). Transparansi dan pengawasan keuangan negara dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 64–70.
18. UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development* (pp. 8–9). New York: United Nations Development Programme.
19. Wacana Edukasi. (2025). Kasus makanan MBG di sekolah.
20. Zulaika, N., Lestari, D., & Hanifah, I. (2025). Tantangan implementasi dan akuntabilitas anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 426–435.
- Muhid, A., Sumarkan, Rakhmawati, Fahmi, L. "Perubahan Perilaku Open Defecation Free (ODF) melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro". *Engagement : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (Maret 2018), 99–119.